

# Monumen Mandala Makassar: Simbol Perjuangan Militer dan Diplomasi dalam Pembebasan Irian Barat (1961–1963)

*Mandala Monument in Makassar: A Symbol of Military Struggle and Diplomacy in the  
Liberation of West Irian (1961–1963)*

**Haryo Mustoko**

Prodi SPD, Fakultas Strategi Pertahanan Unhan RI  
*haryosyifa69@gmail.com*

## **Abstract**

*The Mandala Monument in Makassar, constructed between 1994 and 1995, commemorates Indonesia's struggle to reclaim West Irian (now Papua) from Dutch control during the period 1961–1963. The monument stands not only as a symbol of the military operations conducted under the Mandala Command but also as a reminder of the international diplomacy that culminated in the 1962 New York Agreement and the transitional administration of the United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA). This article examines the Mandala Monument as both a military-historical artifact and a lieu de mémoire—a site of memory—that embodies the state's narrative of national integration. Employing a descriptive-analytical historical approach based on literature review, the study explores the background of the Mandala Command, the interplay of military and diplomatic strategies in conflict resolution, the architectural symbolism of the monument, and its educational and memorial functions. The analysis demonstrates that the Mandala Monument operates as a medium of collective memory, intertwining dimensions of military action, diplomacy, and the symbolic politics of Indonesia's New Order regime.*

*Keywords: Mandala Monument, Trikora, West Irian, diplomacy, military history, collective memory.*

## **Abstrak**

Monumen Mandala di Kota Makassar dibangun pada tahun 1994–1995 sebagai penanda sejarah perjuangan Indonesia dalam merebut kembali Irian Barat dari kekuasaan Belanda pada periode 1961–1963. Monumen ini tidak hanya menjadi simbol keberhasilan operasi militer di bawah Komando Mandala, tetapi juga menegaskan peran diplomasi internasional yang menghasilkan Perjanjian New York (1962) dan transisi administratif melalui United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA). Artikel ini menganalisis Monumen Mandala sebagai artefak

sejarah militer sekaligus *lieu de mémoire* (tempat ingatan) yang merepresentasikan narasi negara tentang integrasi nasional. Dengan pendekatan kajian sejarah deskriptif-analitis berbasis pustaka, tulisan ini menelusuri latar belakang pembentukan Komando Mandala, peran militer-diplomasi dalam penyelesaian konflik, simbolisme arsitektural monumen, dan fungsi edukasi-memorialnya. Kajian ini menunjukkan bahwa Monumen Mandala merupakan media memori kolektif yang menyatukan dimensi militer, diplomasi, dan politik simbolik Orde Baru.

Kata kunci: Monumen Mandala, Trikora, Irian Barat, diplomasi, sejarah militer, memori kolektif.

## Pendahuluan

Pembebasan Irian Barat (1961–1963) merupakan salah satu episode penting dalam sejarah militer sekaligus diplomasi Indonesia pada periode pasca-kemerdekaan. Isu Irian Barat muncul karena Belanda, setelah pengakuan kedaulatan melalui Konferensi Meja Bundar (KMB) 1949, tetap menolak menyerahkan wilayah Papua Barat kepada Republik Indonesia. Posisi Belanda didasarkan pada dalih perbedaan etnis dan budaya antara masyarakat Papua dengan bangsa Indonesia pada umumnya, sehingga Belanda berpendapat bahwa wilayah itu layak dipersiapkan menuju kemerdekaan sendiri (Chauvel, 2005; Drooglever, 2009). Sebaliknya, bagi Indonesia, Irian Barat adalah bagian integral dari wilayah bekas Hindia Belanda yang secara hukum internasional seharusnya masuk ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (Saltford, 2003).

Kebuntuan diplomasi yang berlangsung sepanjang 1950-an mendorong Presiden Sukarno mengambil langkah radikal dengan mengumandangkan Tri Komando Rakyat (Trikora) pada 19 Desember 1961 di Yogyakarta. Trikora berisi tiga instruksi utama: (1) menggagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan Belanda, (2) mengibarkan Sang Merah Putih di Irian Barat, dan (3) memobilisasi seluruh kekuatan nasional untuk mempertahankan keutuhan NKRI (Lev, 1987; Ricklefs, 2008). Trikora merupakan deklarasi politik sekaligus instruksi militer, yang memberi landasan legal dan moral bagi pengerahan sumber daya pertahanan negara.

Sebagai implementasi, pemerintah mendirikan Komando Mandala pada 2 Januari 1962 dengan markas di Makassar. Komando ini dipimpin oleh Mayor Jenderal Soeharto dan berfungsi sebagai komando gabungan untuk merencanakan dan melaksanakan operasi militer terbatas di wilayah Papua Barat (Asumsi, 2024). Keberadaan Komando Mandala menandai salah satu upaya pertama Indonesia membangun struktur komando teater gabungan lintas-matra, di mana angkatan darat, laut, dan udara bekerja di bawah satu payung koordinasi. Hal ini penting karena menunjukkan profesionalisasi militer Indonesia dan pengembangan doktrin pertahanan terpadu sejak awal 1960-an (Anderson, 2015).

Meskipun operasi-operasi persiapan militer telah dilaksanakan, seperti infiltrasi pasukan ke wilayah Papua Barat, pada akhirnya strategi Indonesia lebih banyak ditentukan oleh jalur diplomasi internasional. Amerika Serikat, yang saat itu khawatir akan semakin dekatnya Indonesia ke blok Soviet, memediasi perundingan antara Indonesia dan Belanda. Hasilnya adalah Perjanjian New York (15 Agustus 1962) yang disahkan oleh PBB. Perjanjian ini menyatakan bahwa Belanda akan menyerahkan administrasi Papua Barat kepada United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA) mulai 1 Oktober 1962, sebelum diserahkan secara resmi kepada Indonesia pada 1 Mei 1963 (United Nations, 1962). Perjanjian ini mencerminkan kombinasi antara kekuatan militer terbatas (*hard power*) dan diplomasi internasional (*soft power*) dalam politik luar negeri Indonesia.

Perjuangan ini kemudian diperingati melalui pembangunan Monumen Mandala di Makassar pada era Orde Baru, tepatnya 1994–1995. Gagasan pendirian monumen ini diprakarsai oleh Gubernur Sulawesi Selatan A. Z. B. Palaguna. Batu pertama diletakkan pada 11 Januari 1994 oleh Menko Polkam Soesilo Soedarman, dan monumen diresmikan pada 19 Desember 1995 oleh Presiden Soeharto—sengaja bertepatan dengan ulang tahun Trikora (Kementerian Kebudayaan, 2023). Monumen ini sekaligus menegaskan legitimasi politik Orde Baru dengan mengaitkan peran Soeharto sebagai Panglima Mandala dengan posisinya sebagai Presiden.

Secara arsitektural, Monumen Mandala memiliki makna simbolik yang kaya. Tingginya 62 meter melambangkan tahun 1962, ketika Irian Barat resmi kembali ke pangkuan NKRI. Bentuk segitiga sama sisi merepresentasikan Trikora, sementara relief bambu runcing dan lidah api mengekspresikan semangat perjuangan rakyat yang tidak pernah padam (Reid, 2011). Di dalamnya terdapat museum empat lantai dengan diorama yang menggambarkan latar sejarah kolonial, mobilisasi militer, operasi infiltrasi, diplomasi internasional, hingga serah terima kekuasaan melalui UNTEA. Dengan demikian, monumen ini tidak hanya berfungsi sebagai artefak fisik, tetapi juga sebagai instrumen pendidikan sejarah militer.

Namun, dalam perspektif historiografi kritis, Monumen Mandala juga merupakan bentuk politik memori. Sebagaimana dijelaskan oleh Pierre Nora (1989) tentang *lieux de mémoire*, monumen semacam ini mengkristalkan narasi sejarah resmi yang dipilih negara. Narasi yang ditampilkan cenderung linear dan hegemonik: menekankan keberhasilan militer dan diplomasi, tetapi cenderung menutupi kontroversi seputar Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) 1969 atau dinamika perlawanan lokal di Papua (Chauvel, 2005; Drooglever, 2009). Dengan demikian, Monumen Mandala merupakan ruang ingatan yang memperkuat identitas nasional, sekaligus menyisakan ruang kosong bagi suara-suara alternatif.

Artikel ini bermaksud untuk menjawab pertanyaan: bagaimana Monumen Mandala mempresentasikan hubungan antara perjuangan militer dan diplomasi dalam pembebasan Irian Barat? Pertanyaan ini penting karena menghubungkan dimensi militer dan diplomasi dalam kerangka pembentukan identitas nasional, serta menyingkap bagaimana arsitektur dan kurasi museum berfungsi sebagai medium politik memori. Dengan menjawabnya, tulisan ini diharapkan memberikan kontribusi pada kajian sejarah militer Indonesia, politik memori, serta peran monumen dalam pembentukan identitas kolektif bangsa.

## Metode

Penelitian ini menggunakan metode sejarah dengan pendekatan deskriptif-analitis berbasis pustaka. Metode sejarah dipilih karena objek kajian berupa peristiwa masa lalu yang berkaitan dengan pembebasan Irian Barat dan pendirian Monumen Mandala di Makassar. Metode ini, sebagaimana dijelaskan Gottschalk (1985), menekankan pada empat tahapan penting, yakni heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi.

Tahap pertama adalah heuristik, yakni upaya mencari, menemukan, dan mengumpulkan sumber-sumber yang relevan dengan topik penelitian. Sumber yang digunakan meliputi dokumen primer seperti naskah Perjanjian New York tahun 1962, arsip resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA), serta arsip Kementerian Kebudayaan dan pemerintah daerah Sulawesi Selatan terkait pembangunan Monumen Mandala. Di samping itu, penelitian juga mengandalkan sumber sekunder berupa buku-buku sejarah, artikel jurnal internasional, laporan penelitian, serta literatur kontemporer yang mengulas dimensi militer, diplomasi, dan politik memori dalam konteks integrasi Irian Barat (Saltford, 2003; Chauvel, 2005; Drooglever, 2009).

Tahap berikutnya adalah kritik sumber, yaitu menilai keaslian dan kredibilitas sumber yang diperoleh. Kritik ini terbagi menjadi kritik ekstern dan intern. Kritik ekstern dilakukan untuk memastikan otentisitas dokumen, misalnya dengan membandingkan salinan Perjanjian New York dalam UN Treaty Series dengan arsip resmi Indonesia. Kritik intern, sebaliknya, digunakan untuk menilai isi sumber, termasuk bias, subjektivitas, atau kepentingan politik yang mungkin memengaruhi penyusunan narasi. Dalam konteks ini, narasi resmi pemerintah Indonesia yang menekankan keberhasilan Trikora dibandingkan dengan penelitian akademis independen yang lebih kritis terhadap proses Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) 1969. Perbandingan ini penting agar penulisan sejarah tidak terjebak pada reproduksi

wacana hegemonik, melainkan mampu menampilkan spektrum interpretasi yang lebih luas.

Tahap ketiga adalah interpretasi, yakni proses memberi makna terhadap fakta-fakta yang telah diverifikasi. Pada tahap ini, penulis menafsirkan Monumen Mandala tidak hanya sebagai bangunan fisik, tetapi juga sebagai simbol politik dan ruang memori kolektif. Analisis difokuskan pada bagaimana monumen merepresentasikan keterkaitan antara operasi militer terbatas di bawah Komando Mandala dengan diplomasi internasional yang menghasilkan Perjanjian New York. Selain itu, interpretasi juga diarahkan pada pembacaan simbolisme arsitektural monumen—tinggi 62 meter, bentuk segitiga, relief bambu runcing—sebagai konstruksi visual yang berupaya mengabadikan narasi negara tentang persatuan nasional.

Tahap terakhir adalah historiografi, yakni proses penulisan sejarah dalam bentuk narasi akademik yang menghubungkan aspek faktual dan konseptual. Historiografi tidak sekadar menyusun kronologi peristiwa, tetapi juga menempatkan Monumen Mandala dalam kerangka kajian sejarah militer dan studi memori. Narasi yang dihasilkan berupaya menjembatani antara fakta sejarah, tafsir kritis, dan makna kontemporer, sehingga artikel ini tidak hanya menghadirkan rekonstruksi masa lalu, melainkan juga analisis mengenai fungsi monumen dalam membentuk identitas nasional.

Dengan menggunakan metode sejarah dalam keempat tahapan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan pemahaman komprehensif tentang Monumen Mandala Makassar. Ia dilihat bukan hanya sebagai simbol peringatan militer, tetapi juga sebagai representasi diplomasi dan instrumen politik memori negara.

### **Latar Historis: Trikora dan Komando Mandala**

Deklarasi Trikora pada 19 Desember 1961 di Yogyakarta merupakan respon langsung terhadap upaya Belanda mempertahankan Papua Barat sebagai wilayah kolonial terakhirnya di Asia. Bagi pemerintah Belanda, Papua dianggap memiliki

identitas etnografis yang berbeda sehingga tidak otomatis masuk ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun, bagi Indonesia, argumentasi tersebut bertentangan dengan prinsip integritas teritorial sebagaimana ditetapkan dalam KMB 1949, di mana Irian Barat seharusnya ikut diserahkan kepada Republik (Saltford, 2003). Sukarno, melalui Trikora, menginstruksikan tiga langkah strategis: menggagalkan pembentukan negara boneka Papua, mengibarkan bendera Merah Putih di Irian Barat, serta memobilisasi seluruh kekuatan nasional (Lev, 1987). Trikora bukan sekadar deklarasi politik, melainkan juga mobilisasi total yang memperlihatkan tekad bangsa untuk menyelesaikan sisa kolonialisme.

Sebagai implementasi, pemerintah membentuk Komando Mandala pada 2 Januari 1962 dengan pusat komando di Makassar, dipimpin oleh Mayor Jenderal Soeharto. Penunjukan Makassar memiliki pertimbangan strategis: letaknya relatif dekat dengan teater operasi, infrastruktur pelabuhan dan pangkalan udara cukup memadai, dan secara politik kota ini aman dari kemungkinan gangguan eksternal (Asumsi, 2024). Komando Mandala menjadi laboratorium awal bagi Indonesia untuk melaksanakan operasi gabungan lintas matra, mengintegrasikan kekuatan darat, laut, dan udara dalam satu struktur komando yang solid. Dalam konteks perkembangan militer Indonesia, pembentukan komando ini menjadi tonggak penting modernisasi TNI dan pengembangan strategi proyeksi kekuatan.

Meski sejumlah operasi infiltrasi dilakukan, faktor penentu justru muncul di ranah diplomasi. Amerika Serikat khawatir Indonesia akan jatuh ke blok Soviet bila konflik berkepanjangan, sehingga Washington menekan Belanda untuk berunding. Proses ini menghasilkan Perjanjian New York pada 15 Agustus 1962 yang mengatur penyerahan Irian Barat kepada United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA) mulai 1 Oktober 1962, lalu dilanjutkan ke Indonesia pada 1 Mei 1963 (United Nations, 1962). Trikora dan Komando Mandala dengan demikian berfungsi lebih sebagai tekanan militer yang memperkuat posisi Indonesia di meja diplomasi. Hal ini menunjukkan bagaimana strategi militer dan diplomasi saling mengisi dalam

perjuangan Irian Barat, menjadikannya salah satu studi kasus paling menarik dalam sejarah militer Indonesia modern.

### **Proses Pembangunan Monumen Mandala**

Tiga dekade setelah integrasi Papua, pemerintah Orde Baru memutuskan membangun Monumen Mandala di Makassar. Batu pertama diletakkan pada 11 Januari 1994 oleh Menko Polkam Soesilo Soedarman, sedangkan peresmiannya dilakukan Presiden Soeharto pada 19 Desember 1995, bertepatan dengan peringatan Trikora (Kementerian Kebudayaan, 2023). Pemilihan tanggal bukanlah kebetulan, melainkan strategi simbolik untuk mengikat memori publik pada figur Soeharto sebagai Panglima Mandala yang berhasil melaksanakan tugas negara.

Secara politis, pembangunan monumen ini terjadi dalam konteks Orde Baru yang sedang berupaya memperkuat legitimasi melalui penekanan pada narasi nasionalisme dan stabilitas. Monumen menjadi salah satu instrumen efektif untuk mengabadikan peran rezim dalam sejarah bangsa. Di satu sisi, monumen memperingati perjuangan 1961–1963; di sisi lain, ia menegaskan kembali posisi Soeharto sebagai aktor kunci. Hal ini sejalan dengan praktik politik memori di banyak negara, di mana pembangunan monumen dijadikan sarana untuk mengartikulasikan versi resmi sejarah dan membingkai persepsi kolektif masyarakat (Anderson, 2015).

Makassar sebagai lokasi pembangunan juga memiliki makna historis. Selain menjadi markas Komando Mandala, kota ini sejak masa kolonial sudah dikenal sebagai pusat militer dan perdagangan strategis di Indonesia timur. Dengan demikian, pembangunan monumen tidak hanya menegaskan fungsi Makassar dalam sejarah militer, tetapi juga menjadikannya titik fokus identitas regional yang terhubung dengan narasi nasional.

### **Arsitektur dan Simbolisme**

Monumen Mandala didesain dengan arsitektur yang sarat makna simbolis. Tingginya 62 meter jelas dimaksudkan sebagai penanda tahun 1962, saat Irian Barat berhasil kembali ke pangkuan Indonesia. Angka tersebut dipilih untuk meneguhkan memori kronologis, sekaligus menyampaikan pesan sederhana yang mudah diingat publik. Bentuk segitiga sama sisi merepresentasikan Trikora, tiga komando rakyat yang menjadi dasar mobilisasi perjuangan. Simbolisme geometris ini memberi identitas visual yang kuat, di mana setiap sisi menyiratkan semangat persatuan dalam keberagaman.

Relief pada dinding bawah menggambarkan bambu runcing dan lidah api, melambangkan kontinuitas perjuangan dari masa revolusi hingga era Trikora. Api yang menyala menegaskan tekad rakyat yang tidak pernah padam, sementara bambu runcing menghubungkan perlawanan tradisional dengan operasi militer modern. Dengan demikian, monumen berfungsi sebagai jembatan antara memori perjuangan fisik rakyat dengan modernisasi TNI.

Di dalamnya terdapat museum empat lantai yang memuat diorama operasi militer, arsip foto, serta replika ruang kerja Panglima Mandala. Museum ini menarasikan perjalanan dari kolonialisme Belanda, mobilisasi Trikora, operasi militer, diplomasi internasional, hingga transisi administrasi ke UNTEA. Arsitektur semacam ini mengikuti pola umum monumen Orde Baru yang menggabungkan monumentalitas fisik dengan kurasi naratif linear tentang perjuangan bangsa (Reid, 2011).

### **Fungsi Edukasi dan Memori Kolektif**

Monumen Mandala memiliki fungsi ganda: sebagai objek wisata sejarah sekaligus sarana pendidikan publik. Melalui diorama dan koleksi arsip, pengunjung diajak memahami bagaimana operasi militer dan diplomasi berjaln erat dalam kasus Irian Barat. Bagi kalangan militer dan akademisi, museum ini menyediakan ruang

untuk mempelajari aspek strategi komando gabungan dan peran tekanan militer dalam mendukung diplomasi. Bagi masyarakat umum, monumen menjadi medium untuk menumbuhkan rasa nasionalisme dan kebanggaan atas integritas teritorial.

Namun, perlu dicatat bahwa narasi yang ditampilkan bersifat selektif. Kontroversi mengenai Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) 1969, yang oleh banyak pengamat dianggap tidak sepenuhnya mencerminkan kehendak rakyat Papua, hampir tidak mendapat tempat dalam kurasi museum (Drooglever, 2009; Chauvel, 2005). Hal ini menunjukkan bahwa monumen lebih berfungsi sebagai ruang memori hegemonik ketimbang arena dialog sejarah.

Dalam kerangka teori Pierre Nora (1989) tentang *lieux de mémoire*, Monumen Mandala dapat dipahami sebagai ruang ingatan yang membekukan identitas nasional melalui simbol dan narasi resmi. Monumen bukan sekadar bangunan fisik, melainkan juga media representasi yang membentuk kesadaran kolektif generasi berikutnya. Ia mengajarkan sejarah, tetapi sekaligus mengatur apa yang boleh dan tidak boleh diingat.

### **Analisis Kritis: Militer, Diplomasi, dan Politik Simbolik**

Monumen Mandala pada hakikatnya adalah instrumen politik memori. Dimensi militer tercermin dari penekanan pada kesiapan TNI sebagai penjaga kedaulatan teritorial. Dimensi diplomasi terlihat dari pengakuan bahwa keberhasilan integrasi tidak hanya karena operasi militer, tetapi juga hasil dari negosiasi internasional yang difasilitasi PBB. Dimensi simbolik terwujud dalam kaitan narasi sejarah dengan figur Soeharto, baik sebagai Panglima Mandala maupun sebagai Presiden yang meresmikan monumen.

Kritik akademis menyoroti bahwa narasi monumen cenderung hegemonik. Perspektif masyarakat Papua yang mengalami langsung integrasi sering diabaikan. Narasi yang menekankan “kemenangan nasional” tidak banyak memberi ruang bagi diskusi tentang pengalaman masyarakat Papua pasca-integrasi atau kontroversi

Pepera (Anderson, 2015; Chauvel, 2005). Dengan demikian, Monumen Mandala merepresentasikan versi negara tentang sejarah, bukan keseluruhan spektrum memori kolektif.

Di sisi lain, kehadiran monumen tetap memiliki nilai strategis. Ia menyatukan memori bangsa pada satu simbol yang mudah dikenali, memperkuat nasionalisme, dan memberikan pelajaran penting tentang sinergi antara kekuatan militer dan diplomasi. Untuk memperkaya fungsi edukatifnya, kurasi monumen seharusnya dapat membuka ruang bagi perspektif lokal Papua, baik melalui testimoni, arsip lisan, maupun pameran temporer. Dengan begitu, monumen tidak hanya menjadi ruang memori hegemonik, tetapi juga arena refleksi kritis yang lebih inklusif.

Dengan mengurai latar historis Trikora, proses pembangunan monumen, simbolisme arsitektural, fungsi edukasi, dan analisis kritis, dapat dilihat bahwa Monumen Mandala Makassar beroperasi sebagai representasi integrasi militer-diplomasi dalam sejarah Indonesia. Ia adalah tempat di mana operasi militer terbatas dan diplomasi internasional dikemas dalam narasi monumental, berfungsi memperkuat identitas nasional sekaligus meneguhkan legitimasi politik rezim yang membangunnya. Namun, di balik monumentalitasnya, monumen juga menyisakan pertanyaan tentang memori yang absen dan suara-suara yang terpinggirkan, terutama dari perspektif masyarakat Papua.

## Diskusi

Membaca Monumen Mandala Makassar sebagai artefak memori negara menuntut penggunaan lensa teoretik yang lebih kaya daripada sekadar historiografi deskriptif. Di satu sisi, monumen ini bekerja sebagaimana dirumuskan Pierre Nora sebagai *lieu de mémoire*—ruang di mana ingatan kolektif dipadatkan ke dalam bentuk material (Nora, 1989). Namun, perkembangan studi memori dua dekade terakhir memperluas kerangka ini dengan menekankan bagaimana memori tidak hanya “disimpan” melainkan diproduksi, dinegosiasikan, dan diperebutkan melalui praktik

budaya, kebijakan, dan arsitektur (Assmann, 2011, 2018; Olick, 2019). Dengan demikian, monumen perlu dilihat tidak sekadar sebagai penanda kemenangan militer-diplomasi 1961–1963, tetapi sebagai infrastruktur kultural yang terus-menerus mengatur apa yang patut diingat, bagaimana ia diingat, dan siapa yang punya otoritas untuk mengingatkannya.

Pertama, kerangka memori kultural Aleida Assmann (2011, 2018) berguna untuk membedakan antara *canon* dan *archive*: yang pertama merujuk pada ingatan resmi yang dirayakan dan dipertahankan di ruang publik (misalnya narasi Trikora–Komando Mandala), sementara yang kedua merangkum ingatan yang kurang terlihat—dokumen, testimoni, atau perspektif lokal—yang sering kali terpinggirkan. Monumen Mandala dengan kurasi diorama linear menempatkan integrasi Irian Barat ke dalam *canon* nasional, menekankan kesatuan dan kedaulatan, sembari meminimalkan perdebatan mengenai Pepera 1969 dan pengalaman sehari-hari orang Papua. Kerangka ini menunjukkan bagaimana monumen bertindak sebagai mekanisme kanonisasi—memilih, menyaring, dan menormalisasi ingatan tertentu sebagai “memori bangsa.”

Kedua, pendekatan *critical heritage studies* (Smith, 2006/2020) memperkenalkan gagasan *authorized heritage discourse* (AHD), yakni wacana warisan resmi yang cenderung menonjolkan narasi negara, otoritas teknokratik, dan estetika monumental. Di bawah AHD, bangunan megah, angka simbolik (62), dan geometri segitiga Trikora tampil sebagai bahasa visual yang segera dikenali publik. Tetapi AHD juga mengandung efek “penjinakan”—ia mengemas konflik dan kontestasi menjadi cerita padu. Dengan lensa ini, Monumen Mandala dapat dipahami sebagai teknologi kultural yang meneguhkan legitimasi politik Orde Baru, seraya menata lanskap kota Makassar sebagai panggung memori nasional. Mengintegrasikan gagasan Laurajane Smith dengan *urban spatiality* (Lefebvre, 1991), kita dapat berargumen bahwa monumen ini menghasilkan *produksi ruang* yang memusatkan arus mobilitas simbolik:

upacara, kunjungan sekolah, dan pariwisata sejarah, yang semuanya menegaskan kembali tata memori resmi.

Ketiga, teori multidirectional memory Michael Rothberg (2009/2021) menantang asumsi bahwa ingatan kelompok bersifat *zero-sum*. Ingatan tentang Trikora dan integrasi Irian Barat tidak harus “menghapus” memori lain (misalnya penderitaan lokal atau dinamika pasca-integrasi); sebaliknya, ia dapat dikelola secara dialogis sehingga berbagai pengalaman saling memperkaya. Kerangka ini membuka kemungkinan kuratorial alternatif: pameran temporer yang menampilkan arsip lisan veteran Papua, peta interaktif operasi dan diplomasi, atau kolaborasi riset bersama komunitas lokal. Jika diterapkan, Monumen Mandala dapat bertransformasi dari *authorized narrative site* menjadi forum memori multidireksional yang inklusif.

Keempat, dari perspektif hubungan sipil–militer, literatur kontemporer menekankan dimensi signaling dan legibility publik atas kompetensi militer (Brooks, 2019). Monumen, museum, dan ritual memperantarai pesan strategis bahwa TNI memiliki kapasitas komando gabungan dan kesiapan proyeksi kekuatan—meski dalam kasus Irian Barat, “kemenangan” dilembagakan melalui diplomasi. Dalam kacamata teori coercive diplomacy, operasi terbatas dan mobilisasi Trikora dapat dipahami sebagai *costly signals* yang meningkatkan kredibilitas ancaman Indonesia di hadapan Belanda dan mediator internasional (George & Simons, 1994; Schelling, 1966). Dengan demikian, Monumen Mandala bukan hanya peringatan terhadap masa lalu, tetapi juga artefak komunikasi strategis yang mengekstraksi pelajaran tentang relasi antara kekuatan militer, diplomasi, dan persepsi internasional.

Kelima, wacana memory activism menyoroti bagaimana aktor non-negara—LSM, komunitas, seniman—mengintervensi ruang memori melalui aksi, pameran alternatif, atau kurasi partisipatoris (Gutman, 2017; Olick, 2019). Bila dikelola secara terbuka, Monumen Mandala berpotensi menjadi titik temu antara memori negara dan praktik kewargaan reflektif, misalnya dengan menghadirkan *listening sessions* bagi saksi sejarah dari berbagai latar (veteran, keluarga pelaku operasi, tokoh agama, dan

perwakilan masyarakat Papua). Pendekatan ini sejalan dengan tren global war heritage yang bergerak dari “monumen untuk dilihat” menuju ruang belajar untuk didengar—shift dari objek ke proses.

Keenam, dimensi afektif dari memori—bagaimana emosi dibangkitkan melalui skala, ketinggian, dan narasi visual—semakin diakui dalam literatur. Dalam *affective heritage*, perhatian diarahkan pada koreografi pengalaman pengunjung: langkah menaiki tangga menuju dek observasi, pancang menara setinggi 62 meter, dan pemandangan kota yang mengafirmasi peran Makassar sebagai “titik komando” (Bissell, 2010; Smith, 2020). Disain seperti ini menciptakan rangkaian sensasi yang mengikat indera dengan narasi nasional, sehingga memori tidak hanya diinternalisasi secara kognitif, tetapi juga dirasakan. Bagi pendidikan sejarah, integrasi modul *place-based learning* dan *immersive media*—peta animasi operasi, *timeline* diplomasi, dan arsip digital—dapat memperkaya ranah afektif ini tanpa jatuh pada simplifikasi.

Ketujuh, monumen sebagai arsip ruang mengundang dialog antara *archive* dan *canon*. Penguatan fungsi riset—melalui laboratorium digital, katalog arsip yang dapat diakses peneliti, serta kerja sama dengan kampus—akan menurunkan jarak antara narasi resmi dan kompleksitas data historis. Mengikuti seruan *reflexive memory* (Olick, 2019), pengelola bisa membangun rubrik kuratorial yang mengakui keterbatasan dokumentasi, memaparkan perdebatan akademik (misalnya seputar Pepera 1969), dan mendorong literasi sejarah kritis. Alih-alih mengancam narasi nasional, keterbukaan ini justru memperkuat legitimasinya, karena negara tampak percaya diri menghadapi keragaman memori.

Kedelapan, dalam kerangka diplomasi budaya (*cultural diplomacy*), monumen nasional dapat difungsikan sebagai etalase *nation-branding* yang menunjukkan kemampuan Indonesia menyelesaikan dekolonisasi melalui kombinasi operasi terbatas dan kesepakatan internasional. Narasi New York Agreement dan UNTEA dapat disajikan bukan semata sebagai pengesahan politik, tetapi sebagai precedent regional tentang *war-to-peace transition* yang relevan bagi kajian keamanan Asia

Tenggara. Di sini, Monumen Mandala berpotensi melampaui fungsinya sebagai situs domestik, menjadi node pertukaran pengetahuan lintas-negara—sejalan dengan tren museum militer modern yang membangun jejaring riset, pameran keliling, dan arsip digital terbuka.

Akhirnya, sinergi teori-teori di atas mengarah pada rekomendasi konseptual-praktis. Pada tataran konseptual, kita memadukan *lieux de mémoire* (Nora) dengan memori kultural (Assmann), *authorized heritage discourse* (Smith), multidirectional memory (Rothberg), dan reflexive memory (Olick) untuk menghasilkan matriks analisis yang memeriksa siapa yang berbicara, medium apa yang digunakan, dan bagaimana pengalaman pengunjung dikelola secara afektif. Pada tataran praktis, strategi kuratorial dapat diarahkan pada: (1) inklusivitas sumber—mengundang arsip lisan dan testimoni Papua; (2) transparansi historiografis—memaparkan area konsensus dan kontroversi dalam panel informatif; (3) inovasi pedagogis—memakai peta animasi, *QR-based trails*, dan *virtual exhibits*; serta (4) kemitraan penelitian—menghubungkan museum dengan universitas, lembaga arsip, dan komunitas untuk memperluas jaringan pengetahuan. Dengan cara ini, Monumen Mandala tidak hanya mempertahankan posisinya sebagai simbol perjuangan militer-diplomasi Indonesia, tetapi juga berkembang menjadi platform memori yang dialogis, berlapis, dan berdaya penjelas terhadap kompleksitas sejarah nasional.

## Kesimpulan

Monumen Mandala Makassar merupakan salah satu artefak sejarah penting yang memadukan dimensi militer, diplomasi, dan politik simbolik dalam narasi pembebasan Irian Barat (1961–1963). Melalui kajian sejarah deskriptif-analitis berbasis pustaka, dapat dipahami bahwa monumen ini bukan sekadar penanda fisik, melainkan juga medium memori kolektif bangsa. Ia merepresentasikan sinergi antara operasi militer terbatas yang disiapkan melalui Komando Mandala di Makassar dan

jalur diplomasi internasional yang dimediasi Amerika Serikat serta Perserikatan Bangsa-Bangsa hingga lahirnya Perjanjian New York 1962.

Secara historis, deklarasi Trikora dan pembentukan Komando Mandala menegaskan komitmen Indonesia dalam menuntaskan dekolonisasi. Dari Makassar, operasi gabungan lintas matra direncanakan sebagai langkah militer untuk menekan posisi Belanda. Namun, diplomasi pada akhirnya menjadi kunci yang memungkinkan terjadinya transisi damai melalui UNTEA, sebelum Irian Barat resmi bergabung ke dalam NKRI pada 1 Mei 1963. Dengan demikian, perjuangan Irian Barat menjadi contoh konkret bagaimana kekuatan militer dan diplomasi bekerja secara simultan dalam politik luar negeri Indonesia.

Proses pembangunan Monumen Mandala pada 1994–1995 menunjukkan dimensi politik memori era Orde Baru. Dengan meresmikan monumen pada peringatan Trikora, Presiden Soeharto tidak hanya memperingati sejarah nasional, tetapi juga meneguhkan kembali legitimasi politiknya melalui asosiasi simbolis dengan peran masa lalu sebagai Panglima Mandala. Hal ini sejalan dengan praktik rezim Orde Baru yang banyak menggunakan monumen dan museum sebagai sarana membingkai sejarah resmi negara.

Dari sisi arsitektur, simbolisme monumen sangat kental: tinggi menara 62 meter melambangkan tahun integrasi 1962, bentuk segitiga sama sisi merepresentasikan Trikora, dan relief bambu runcing serta lidah api menegaskan semangat perjuangan yang tidak padam. Kehadiran museum empat lantai di dalamnya memperluas fungsi monumen, tidak hanya sebagai tanda peringatan, tetapi juga sebagai ruang edukasi publik. Melalui diorama, arsip, dan replika ruang Panglima Mandala, pengunjung diajak untuk memahami narasi linear perjuangan bangsa, mulai dari mobilisasi Trikora, operasi militer, hingga diplomasi internasional.

Namun, kajian kritis menunjukkan bahwa narasi yang dikonstruksi di Monumen Mandala bersifat hegemonik. Perspektif masyarakat Papua dan kontroversi seputar Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) 1969 hampir tidak

mendapat tempat dalam kurasi museum. Hal ini mencerminkan bagaimana monumen berfungsi lebih sebagai *lieu de mémoire* (Nora, 1989) yang membekukan memori resmi negara, ketimbang sebagai ruang dialog sejarah yang inklusif. Meski demikian, tidak dapat disangkal bahwa monumen ini tetap memiliki nilai strategis sebagai instrumen nasionalisme, pendidikan sejarah, dan pengingat integritas teritorial Indonesia.

Bagi studi sejarah militer, Monumen Mandala memperlihatkan pentingnya struktur komando gabungan, strategi operasi terbatas, serta peran militer dalam mendukung diplomasi. Bagi studi politik memori, monumen ini menjadi contoh bagaimana negara menggunakan arsitektur monumental untuk membentuk identitas nasional dan memperkuat legitimasi politik. Ke depan, fungsi monumen dapat diperluas dengan menghadirkan kurasi yang lebih kritis dan inklusif, misalnya dengan melibatkan perspektif lokal Papua, testimoni saksi sejarah, serta penggunaan teknologi digital interaktif untuk memperkaya pengalaman belajar pengunjung.

Dengan demikian, Monumen Mandala Makassar bukan hanya simbol keberhasilan militer dan diplomasi Indonesia pada 1960-an, melainkan juga ruang refleksi tentang bagaimana bangsa ini memilih untuk mengingat masa lalunya. Ia adalah monumen kemenangan, tetapi sekaligus juga pengingat akan perlunya keterbukaan terhadap memori yang beragam. Pada titik inilah, Monumen Mandala dapat terus berfungsi sebagai warisan sejarah yang relevan, baik untuk generasi masa kini maupun masa depan, dalam upaya memahami makna persatuan dan kedaulatan nasional Indonesia.

### Daftar Pustaka

- Anderson, B. (2015). *Nationalism and cultural memory in Southeast Asia*. Routledge.
- Asumsi. (2024, Januari 2). Komando Mandala dan Trikora: Markas di Makassar. *Asumsi.co*. <https://asumsi.co>

- Assmann, A. (2011). *Cultural memory and Western civilization: Functions, media, archives*. Cambridge University Press.
- Assmann, A. (2018). Canon and archive. In A. Erll & A. Nünning (Eds.), *Cultural memory studies* (updated ed.). De Gruyter.
- Bissell, D. (2010). Affective assemblages: Body, intensity, and mobility. *Environment and Planning A: Economy and Space*, 42(11), 2743–2761. <https://doi.org/10.1068/a43609>
- Brooks, R. (2019). Integrating the civil–military relations research program. *Annual Review of Political Science*, 22, 379–398. <https://doi.org/10.1146/annurev-polisci-060518-025426>
- Chauvel, R. (2005). *Constructing Papuan nationalism: History, ethnicity, and adaptation*. East-West Center.
- Drooglever, P. J. (2009). *An act of free choice: Decolonization and the right to self-determination in West Papua*. Oneworld.
- George, A. L., & Simons, W. E. (1994). *The limits of coercive diplomacy* (2nd ed.). Westview Press.
- Gottschalk, L. (1985). *Understanding history: A primer of historical method*. Knopf.
- Gutman, Y. (2017). *Memory activism: Reimagining the past for the future in Israel/Palestine*. Vanderbilt University Press.
- Kementerian Kebudayaan. (2023). *Profil Museum Monumen Mandala Pembebasan Irian Barat*. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. <https://kemdikbud.go.id>
- Lefebvre, H. (1991). *The production of space* (D. Nicholson-Smith, Trans.). Blackwell.
- Lev, D. S. (1987). *Political power in Indonesia*. Equinox.
- Nora, P. (1989). Between memory and history: Les lieux de mémoire. *Representations*, 26, 7–24. <https://doi.org/10.2307/2928520>
- Olick, J. K. (2019). *The sinews of the past: Memory, history, and the social body*. University of Chicago Press.



- Reid, A. (2011). *To nation by revolution: Indonesia in the 20th century*. NUS Press.
- Ricklefs, M. C. (2008). *A history of modern Indonesia since c. 1200* (4th ed.). Palgrave Macmillan.
- Rothberg, M. (2009). *Multidirectional memory: Remembering the Holocaust in the age of decolonization*. Stanford University Press.
- Saltford, J. (2003). *The United Nations and the Indonesian takeover of West Papua, 1962–1969: The anatomy of betrayal*. RoutledgeCurzon.
- Schelling, T. C. (1966). *Arms and influence*. Yale University Press.
- Smith, L. (2006/2020). *Uses of heritage* (Updated ed.). Routledge.
- United Nations. (1962). *Agreement between the Republic of Indonesia and the Kingdom of the Netherlands concerning West New Guinea (New York Agreement), 15 August 1962*. *United Nations Treaty Series*, 437, 273–282. <https://treaties.un.org>